

Evaluation of Inclusive Education Policies at the Level of Primary and Secondary Education in Indonesia

(Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia)

Munawir Yusuf, Salim Choiri, Mahardika Supratiwi

Program Studi Pendidikan Luar Biasa FKIP UNS

E-mail: munawir_uns@yahoo.co.id

Abstract: This study examines the implementation of inclusive education at the elementary and secondary level of education in Indonesia through 9 dimensions, namely institutional dimension, curriculum dimension, learning dimension, assessment dimension, student dimension, human resource dimension, the dimension of facilities and infrastructure, and financing dimensions. This study uses a survey approach involving 82 elementary, junior high schools, vocational schools that provide inclusive education from 16 districts/cities in 7 Provinces in Indonesia. A sample of Province of Regency / City and educational unit selected by purposive random sampling. Data collection of the Self-Evaluation Instrument of Inclusive Schools from Yusuf (2014) covering Form 1, 2, and 3. Data analysis used descriptive statistics with 5 categories (0-20%), less (21% - 40%), moderate (41% - 60%), good (61% - 80%) and very good (81% - 100%). The results show that the implementation of inclusive education at the primary and secondary education unit level is as follows: (1) the average institutional aspect of 62%; (2) aspects of the curriculum averaging 71.1%; (3) average learning aspect 53,1%; (4) assessment aspect and average grade increase 60,9%; (5) student aspect average 54,6%; (6) aspects of human resources averaging 45.8%; (7) aspects of facilities and infrastructure averaged 22.1%; (8) aspects of community participation averaged 50.8%; and (9) average financing aspects of 45.4%.

Keywords: inclusive education, self-evaluation, government policy

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia melalui 9 dimensi, yaitu dimensi kelembagaan, dimensi kurikulum, dimensi pembelajaran, dimensi penilaian, dimensi kesiswaan, dimensi SDM, dimensi sarana dan prasarana, dimensi peran serta masyarakat, dan dimensi pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan melibatkan 82 SD, SMP, SMK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dari 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi di Indonesia. Sampel Provinsi Kab/Kota dan satuan pendidikan dipilih secara purposif random sampling. Pengumpulan data Instrumen Evaluasi Diri Sekolah Inklusif dari Yusuf (2014) yang meliputi Form 1, 2, dan 3. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan 5 kategori yaitu sangat kurang (0 – 20%), kurang (21% - 40%), sedang (41% - 60%), baik (61% - 80%) dan sangat baik (81% - 100%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai berikut: (1) aspek kelembagaan rata-rata 62%; (2) aspek kurikulum rata-rata 71,1%; (3) aspek pembelajaran rata-rata 53,1%; (4) aspek penilaian dan kenaikan kelas rata-rata 60,9%; (5) aspek kesiswaan rata-rata 54,6%; (6) aspek sumber daya manusia rata-rata 45,8%; (7) aspek sarana dan prasarana rata-rata 22,1%; (8) aspek peran serta masyarakat rata-rata 50,8%; dan (9) aspek pembiayaan rata-rata 45,4%.

Kata kunci : pendidikan inklusi, evaluasi diri, kebijakan pemerintah

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia antara lain tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut antara lain ditegaskan bahwa pendidikan bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus. (Penjelasan Ps. 15). Penjabaran dari undang-undang tersebut antara lain telah diatur mengenai implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 (Pasal 2), Pendidikan Inklusif

adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (pasal 1). Salah satu tujuan pendidikan inklusif dikembangkan di Indonesia adalah “mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik”.

Pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan sebuah evolusi, yakni proses perubahan paradigma pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Paradigma lama memandang ABK sebagai sumber hambatan untuk kemajuan pendidikannya. Karena itu agar mudah dalam pengelolaannya, maka pendidikan bagi ABK dipisahkan dari anak lain yang sebaya (segregatif).

Dalam perspektif keilmuan, model pendidikan segregatif bagi ABK dikenal dengan pendekatan medis (Barnes & Mercer, 2003). Anak-anak penyandang disabilitas dipandang sebagai problem medis sebagai akibat kekurangan atau kerusakan fisik dan mental (*impairment*) dan karenanya mereka harus 'disembuhkan'. Pandangan tersebut dikenal dengan istilah '*personal tragedy theory, individual model* atau *medical model* (Oliver, 1990, Barnes & Mercer, 2003). Inti dari pandangan lama tersebut yaitu: 1) disabilitas merupakan problem pada level individu (*individual model*); 2) disabilitas disamakan dengan kekurangan atau keterbatasan fisik/mental (*impairment*); dan 3) solusi yang dianggap paling tepat untuk mengatasi disabilitas adalah intervensi medis, psikologis dan psikiatris.

Paradigma baru muncul sebagai sebuah protes atas ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif akibat pandangan medis terhadap disabilitas. Sekitar tahun 1976 UPIAS (*Union of the Physically Impaired Against Segregation*) sebuah organisasi para difabel Inggris, mengusung ide baru bahwa disabilitas adalah problem yang diakibatkan oleh hambatan-hambatan lingkungan dan sosial (*social barriers*). Disabilitas adalah keterbatasan aktivitas yang disebabkan oleh karena pengaturan/pengorganisasian masyarakat kontemporer yang tidak atau sangat sedikit mempertimbangkan individu yang memiliki kekurangan fisik dan bahkan kemudian mengucilkan mereka dari aktivitas sosial (Ro'fah, *et.al.*, 2010).

Persepsi UPIAS ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan-ilmuwan penyandang disabilitas di Inggris, di antaranya Michael Oliver (1990), dan (Barnes & Mercer, 2003) sehingga menjadi sebuah pendekatan baru yang kemudian dikenal luas dengan istilah '*Social Model of Disability*'. Pendekatan baru meyakini bahwa faktor – faktor lingkungan dan pengorganisasian sosial merupakan kunci pendidikan bagi penyandang disabilitas (ABK). Jika kondisi lingkungan dan pengorganisasian sosial dapat diubah sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap anak mendapatkan akses dan pelayanan pendidikan yang sesuai dan layak, maka ABK akan tumbuh dan berkembang secara optimal seperti anak-anak lain pada umumnya.

Implikasi dari pergeseran paradigma pendidikan ABK dari model medis ke model sosial, maka sistem pendidikan ABK bergeser dari sistem segregasi ke sistem integrasi dan inklusi. Sistem pendidikan integrasi atau terpadu adalah sistem yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem segregasi. Sistem ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi ABK untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler

bersama-sama dengan anak-anak sebaya yang lain. Banyak hal positif dapat diperoleh dalam pendidikan integratif terutama berkembangnya dimensi '*soft skills*' ABK, misalnya kemandirian, keterampilan sosial, komunikasi, sikap dan perilaku, kepemimpinan, dan lain-lain. Stainback & Stainback (1996) mengatakan bahwa '*all children are enriched by having the opportunity to learn from one another, Grow to care for one another, and gain the attitudes, skills, and values necessary for our communities to support the inclusion of all citizens*'

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan luar biasa, menemukan banyak bukti baru, bahwa ABK dengan berbagai hambatan fisik dan/atau intelektualnya, mereka mampu mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah reguler setelah guru dan sumberdaya lain di sekolah, kurikulum dan pembelajaran didesain khusus sehingga memungkinkan setiap individu mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Yi, *et.al.*, 2006). Temuan semacam ini memperjelas bahwa pendekatan sosial dapat mengatasi hambatan pendidikan bagi ABK, dan sekaligus mempertegas bahwa pendekatan medis bukan satu-satunya solusi dalam mengatasi hambatan pendidikan bagi ABK.

Lahirnya paradigma pendekatan sosial dalam pelayanan pendidikan bagi semua anak, menjadi salah satu titik tolak kelahiran pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk dapat belajar bersama meskipun dengan tuntutan kurikulum dan pembelajaran yang berbeda. Pendidikan inklusif merupakan filosofi dan sekaligus metodologi dalam mewujudkan sebuah lingkungan sosial dan pendidikan yang memungkinkan semua anak akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Melalui asesmen profesional, kurikulum dan pembelajaran yang diadaptasi, sistem penilaian yang adil, serta media dan sarana prasarana yang disesuaikan, maka setiap anak akan dapat mengikuti pendidikan yang layak dan bermutu dalam *setting* pendidikan inklusif (Yusuf & Irdianto, 2009). Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak saja bernilai penting untuk pemerataan pendidikan, akan tetapi juga mutu dan relevansi pendidikan.

Perkembangan pendidikan inklusif yang cukup pesat di Indonesia, perlu segera diimbangi dengan sistem monitoring dan evaluasi agar kebijakan pendidikan inklusif dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Australia – Indonesia Partnership melalui *MCPM-AIBEP* tahun 2008 mengembangkan model monitoring dan evaluasi sekolah inklusi dengan memasukkan 6 aspek atau dimensi sekolah inklusi yaitu: 1) Kelembagaan; 2) Kurikulum; Pembelajaran dan Evaluasi; 3) Ketenagaan; 4) Kesiswaan; 5) Sarana Prasarana; dan 6) Pembiayaan. (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Tabel 1. Kepemilikan Alamat Web dan E-mail Sekolah

Kriteria	Σ	%
Tidak ada	3	4
Ada	77	94
Tidak Memberi Jawaban	2	2
Total	82	100%

Tabel 2. Status Akreditasi Sekolah

Kriteria	S	%
Belum terakreditasi	1	1
Akreditasi C	2	2
Akreditasi B	21	26
Akreditasi A	57	70
Tidak Memberi Jawaban	1	1
Total	82	100%

Tabel 3. Keberfungsian Komite Sekolah

Kriteria	Σ	%
Tidak ada	0	0
Ada kurang berfungsi	7	9
Ada berfungsi dengan baik	74	90
Tidak Memberi Jawaban	1	1
Total	82	100%

Sunardi, dkk (2010) melalui penelitiannya di beberapa provinsi di Indonesia, berhasil mengembangkan model pengukuran implementasi sekolah inklusi yang lebih spesifik. Setidaknya ada 7 dimensi atau aspek yang mengalami perubahan sebagai implikasi manajerial sekolah inklusi. Ketujuh dimensi atau aspek tersebut: 1) aspek manajemen dan kelembagaan; 2) aspek kesiswaan; 3) aspek identifikasi dan asesmen; 4) aspek kurikulum; 5) aspek pembelajaran; 6) aspek penilaian; dan 7) aspek dukungan.

Mempertimbangkan berbagai dimensi dalam implementasi pendidikan inklusif, maka dalam penelitian ini mengkaji 9 dimensi implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan, yaitu (1) dimensi kelembagaan, (2) dimensi kurikulum, (3) pembelajaran, (4) penilaian, (5) dimensi kesiswaan, (6) dimensi SDM, (7) dimensi sarana dan prasarana, (8) dimensi peran serta masyarakat, dan (9) dimensi pembiayaan. Aspek-aspek ini akan digunakan sebagai kriteria dalam mengukur implementasi pendidikan inklusi di tingkat satuan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei di 16 Kabupaten/Kota dari 7 Provinsi di Indonesia. Setiap Kabupaten diambil 3 SD, 1 SMP dan 1 SMA/SMK yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Jumlah sekolah yang berhasil dimintai datanya

adalah 82 sekolah.

Instrumen pengumpulan data menggunakan Form Evaluasi Diri sekolah inklusi yang dikembangkan oleh Yusuf (2014) dengan sedikit modifikasi sesuai hasil diskusi dengan ahli pengukuran pendidikan inklusif. Terdapat 9 aspek/dimensi yang diukur dalam implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan, yaitu : (1) dimensi kelembagaan, (2) dimensi kurikulum, (3) pembelajaran, (4) penilaian, (5) dimensi kesiswaan, (6) dimensi SDM, (7) dimensi sarana dan prasarana, (8) dimensi peran serta masyarakat, dan (9) dimensi pembiayaan.

Berdasarkan data yang masuk, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan mengkategorisasikan ke dalam 5 kategori yaitu sangat kurang, kurang, sedang, baik dan sangat baik. Skor ideal yang diharapkan sesuai dengan instrumen adalah 365 sedangkan skor terendah adalah 101. Penetapan kategorisasi ditentukan dengan menggunakan : sangat kurang 0 – 20% tingkat pencapaian, 21% - 40% kurang, 41% - 60% sedang, 61% - 80% baik, dan di atas 81% kategori sangat baik.

HASIL

Profil sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

Kepemilikan Alamat Web dan E-mail Sekolah

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi di Indonesia yang menjadi sampel penelitian, terdapat 77 sekolah (94%) yang memiliki alamat web dan e-mail sekolah, 3 sekolah (4%) yang tidak memiliki alamat web dan e-mail sekolah, dan 2 sekolah (2%) tidak memberikan jawaban mengenai kepemilikan alamat web dan e-mail sekolah.

Status Akreditasi Sekolah

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi di Indonesia yang menjadi sampel penelitian, terdapat 57 sekolah (70%) dengan status akreditasi A, 21 sekolah (26%) dengan status akreditasi B, 2 sekolah (2%) dengan status akreditasi C, 1 sekolah (1%) dengan sekolah belum terakreditasi, dan 1 sekolah (1%) tidak memberikan jawaban mengenai status akreditasi sekolahnya.

Keberfungsian Komite Sekolah

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi di Indonesia yang menjadi sampel penelitian, terdapat 74 sekolah (90%) memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik, 7 sekolah (9%) yang memiliki komite sekolah tetapi tidak berfungsi dengan baik, tidak ada sekolah (0%) yang tidak memiliki komite sekolah, dan 1 sekolah (1%) yang tidak memberikan jawaban mengenai keberfungsian komite sekolah.

Tabel 4. Rumusan Visi dan Misi Sekolah

Kriteria	Σ	%
Belum punya	1	1
Ada tidak dipajang secara terbuka	2	2
Ada dipajang di tempat terbuka	78	95
Tidak Memberi Jawaban	1	1
Total	82	100%

Tabel 5. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi

Kriteria	Σ	%
Sangat Kurang	0	0
Kurang	0	0
Sedang	26	32
Baik	45	55
Sangat Baik	11	13
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		68,5% (Baik)

Tabel 6. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Inklusi

Kriteria	S	%
Sangat Kurang	0	0
Kurang	0	0
Sedang	21	26
Baik	56	68
Sangat Baik	5	6
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		67,8% (Baik)

Tabel 7. Keadaan Kesiswaan Sekolah Inklusi

Kriteria	Σ	%
Sangat Kurang	0	0
Kurang	2	3
Sedang	5	6
Baik	29	35
Sangat Baik	46	56
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		77,4% (Baik)

Visi dan Misi Sekolah

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi di Indonesia yang menjadi sampel penelitian, terdapat 78 sekolah (95%) memiliki rumusan visi dan misi sekolah dan dipajang di tempat terbuka, 2 sekolah (2%) memiliki rumusan masalah visi dan misi sekolah tetapi tidak dipajang secara terbuka, 1 sekolah (1%) belum memiliki rumusan visi dan

misi sekolah, dan 1 sekolah (1%) tidak memberikan jawaban mengenai kebermilikan rumusan visi dan misi sekolah.

Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki keadaan sarana dan prasarana yang berada pada kategori Baik (68,5%). Rincian keadaan sarana dan prasarana dijabarkan sebagai berikut: tidak ada sekolah (0%) yang memiliki keadaan sarana dan prasarana sekolah yang berada pada kategori Sangat Kurang dan Kurang, 26 sekolah (32%) berada pada kategori Sedang, 45 sekolah (55%) berada pada kategori Baik, dan 11 sekolah (13%) berada pada kategori Sangat Baik.

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berada pada kategori Baik (67,8%). Rincian keadaan tenaga pendidik dan kependidikan dijabarkan sebagai berikut: tidak ada sekolah (0%) yang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berada pada kategori Sangat Kurang dan Kurang, 21 sekolah (26%) berada pada kategori Sedang, 56 sekolah (68%) berada pada kategori Baik, dan 5 sekolah (6%) berada pada kategori Sangat Baik.

Kesiswaan

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki keadaan kesiswaan yang berada pada kategori Baik (77,4%). Rincian keadaan kesiswaan dijabarkan sebagai berikut: tidak ada sekolah (0%) yang memiliki keadaan kesiswaan yang berada pada kategori Sangat Kurang, 2 sekolah (3%) berada pada kategori Kurang, 5 sekolah (6%) berada pada kategori Sedang, 29 sekolah (35%) berada pada kategori Baik, dan 46 sekolah (56%) berada pada kategori Sangat Baik.

*Implementasi Pendidikan Inklusif**Aspek Kelembagaan Sekolah Inklusi*

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki aspek kelembagaan yang berada pada kategori Baik (62%). Rincian aspek kelembagaan dijabarkan sebagai berikut: 3 sekolah (4%) yang memiliki keadaan kelembagaan yang berada pada kategori Sangat Kurang, 13 sekolah (16%) berada pada kategori Kurang, 22 sekolah (27%) berada pada kategori Sedang, 24 sekolah (29%) berada pada kategori Baik, dan 20 sekolah (24%) berada pada kategori Sangat Baik.

Tabel 8. Aspek Kelembagaan Sekolah Inklusi

Kriteria	Σ	%
Sangat Kurang	3	4
Kurang	13	16
Sedang	22	27
Baik	24	29
Sangat Baik	20	24
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		62% (Baik)

Tabel 9. Aspek Kurikulum Sekolah Inklusi

Kriteria	S	%
Sangat Kurang	16	19
Kurang	4	5
Sedang	3	4
Baik	7	9
Sangat Baik	52	63
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		71.1% (Baik)

Tabel 10. Aspek Pembelajaran Sekolah Inklusi

Kriteria	Σ	%
Sangat Kurang	8	10
Kurang	19	23
Sedang	23	28
Baik	20	24
Sangat Baik	12	15
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		53.1% (Sedang)

Tabel 11. Aspek Penilaian dan Kenaikan Kelas Sekolah Inklusi

Kriteria	Σ	%
Sangat Kurang	5	6
Kurang	12	15
Sedang	21	26
Baik	25	30
Sangat Baik	19	23
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		60.9% (Baik)

Aspek Kurikulum

Berdasarkan Tabel 9, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki aspek kurikulum yang berada pada

kategori Baik (71,1%). Rincian aspek kurikulum dijabarkan sebagai berikut: 16 sekolah (19%) yang memiliki keadaan kurikulum yang berada pada kategori Sangat Kurang, 4 sekolah (5%) berada pada kategori Kurang, 7 sekolah (9%) berada pada kategori Sedang, 7 sekolah (9%) berada pada kategori Baik, dan 52 sekolah (63%) berada pada kategori Sangat Baik.

Aspek Pembelajaran

Berdasarkan Tabel 10, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki aspek pembelajaran yang berada pada kategori Sedang (53,1%). Rincian aspek pembelajaran dijabarkan sebagai berikut: 8 sekolah (10%) yang memiliki aspek pembelajaran yang berada pada kategori Sangat Kurang, 19 sekolah (23%) berada pada kategori Kurang, 23 sekolah (28%) berada pada kategori Sedang, 20 sekolah (24%) berada pada kategori Baik, dan 12 sekolah (15%) berada pada kategori Sangat Baik.

Aspek Penilaian dan Kenaikan Kelas

Berdasarkan Tabel 11, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki aspek penilaian dan kenaikan kelas yang berada pada kategori Baik (60,9%). Rincian aspek penilaian dan kenaikan kelas dijabarkan sebagai berikut: 5 sekolah (6%) yang memiliki aspek penilaian dan kenaikan kelas yang berada pada kategori Sangat Kurang, 12 sekolah (15%) berada pada kategori Kurang, 21 sekolah (26%) berada pada kategori Sedang, 25 sekolah (30%) berada pada kategori Baik, dan 19 sekolah (23%) berada pada kategori Sangat Baik.

Aspek Kesiswaan

Berdasarkan Tabel 12, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki aspek kesiswaan yang berada pada kategori Sedang (54,6%). Rincian aspek kesiswaan dijabarkan sebagai berikut: 9 sekolah (11%) yang memiliki aspek kesiswaan yang berada pada kategori Sangat Kurang, 9 sekolah (11%) berada pada kategori Kurang, 27 sekolah (33%) berada pada kategori Sedang, 27 sekolah (33%) berada pada kategori Baik, dan 10 sekolah (12%) berada pada kategori Sangat Baik.

Aspek Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Tabel 13, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki aspek sumber daya manusia yang berada pada kategori Kurang (45,8%). Rincian aspek sumber daya manusia dijabarkan sebagai berikut: 13 sekolah (16%) yang memiliki aspek sumber daya manusia yang berada pada kategori Sangat Kurang, 14 sekolah (17%) berada pada kategori Kurang, 33 sekolah (40%) berada pada kategori Sedang, 21 sekolah (26%) berada pada kategori Baik, dan 1 sekolah (1%) berada pada kategori Sangat Baik.

Tabel 12. Aspek Kesiswaan Sekolah Inklusi

Kriteria	Σ	%
Sangat Kurang	9	11
Kurang	9	11
Sedang	27	33
Baik	27	33
Sangat Baik	10	12
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		54.6% (Sedang)

Tabel 13. Aspek Sumber Daya Manusia Sekolah Inklusi

Kriteria	S	%
Sangat Kurang	13	16
Kurang	14	17
Sedang	33	40
Baik	21	26
Sangat Baik	1	1
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		45.8% (Kurang)

Tabel 14. Aspek Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi

Kriteria	S	%
Sangat Kurang	43	52
Kurang	23	28
Sedang	13	16
Baik	3	4
Sangat Baik	0	0
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		22.1% (Kurang)

Tabel 15. Aspek Peran Serta Masyarakat Sekolah Inklusi

Kriteria	Σ	%
Sangat Kurang	5	6
Kurang	15	18
Sedang	38	47
Baik	18	22
Sangat Baik	6	7
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		50.8% (Sedang)

Tabel 16. Aspek Pembiayaan Sekolah Inklusi

Kriteria	S	%
Sangat Kurang	20	25
Kurang	10	12
Sedang	23	28
Baik	23	28
Sangat Baik	6	7
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		45.4% (Sedang)

Aspek Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Tabel 14, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki aspek sarana dan prasarana yang berada pada kategori Kurang (22,1%). Rincian aspek sarana dan prasarana dijabarkan sebagai berikut: 43 sekolah (52%) yang memiliki aspek sarana dan prasarana yang berada pada kategori Sangat Kurang, 23 sekolah (28%) berada pada kategori Kurang, 13 sekolah (16%) berada pada kategori Sedang, 3 sekolah (4%) berada pada kategori Baik, dan tidak ada sekolah (0%) berada pada kategori Sangat Baik.

Aspek Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan Tabel 15, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki aspek peran serta masyarakat yang berada pada kategori Sedang (50,8%). Rincian aspek peran serta masyarakat dijabarkan sebagai berikut: 5 sekolah (6%) yang memiliki aspek peran serta masyarakat yang berada pada kategori Sangat Kurang, 15 sekolah (18%) berada pada kategori Kurang, 38 sekolah (47%) berada pada kategori Sedang, 18 sekolah (22%) berada pada kategori Baik, dan 6 sekolah (7%) berada pada kategori Sangat Baik.

Aspek Pembiayaan

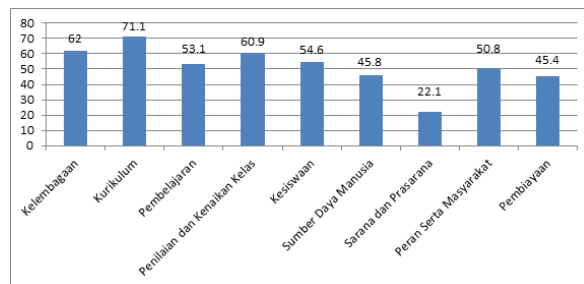
Berdasarkan Tabel 16, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki aspek pembiayaan yang berada pada kategori Sedang (45,4%). Rincian aspek pembiayaan dijabarkan sebagai berikut: 20 sekolah (25%) yang memiliki aspek pembiayaan yang berada pada kategori Sangat Kurang, 10 sekolah (12%) berada pada kategori Kurang, 23 sekolah (28%) berada pada kategori Sedang, 23 sekolah (28%) berada pada kategori Baik, dan 6 sekolah (7%) berada pada kategori Sangat Baik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 17, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, rata-rata memiliki capaian kinerja kategori sedang (60,8%). Rincian total capaian dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Total Capaian Sekolah Inklusi

Kriteria	S	%
Sangat Kurang	0	0
Kurang	5	6
Sedang	33	40
Baik	43	53
Sangat Baik	1	1
Total	82	100%
Rata-rata Capaian		60.8% (Sedang)

Gambar 1. Rekapitulasi Implementasi Pendidikan Inklusi

Tidak ada sekolah (0%) yang memiliki total capaian yang berada pada kategori Sangat Kurang, 5 sekolah (6%) berada pada kategori Kurang, 33 sekolah (40%) berada pada kategori Sedang, 43 sekolah (53%) berada pada kategori Baik, dan 1 sekolah (1%) berada pada kategori Sangat Baik.

Rekapitulasi Implementasi Pendidikan Inklusi

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa rekapitulasi implementasi pendidikan inklusi dari 82 sekolah di Indonesia yang menjadi sampel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: aspek kelembagaan 62%, aspek kurikulum 71,1%, aspek pembelajaran 53,1%, aspek penilaian dan kenaikan kelas 60,9%, aspek kesiswaan 54,6%, aspek sumber daya manusia 45,8%, aspek sarana dan prasarana 22,1%, aspek peran serta masyarakat 50,8%, dan aspek pembiayaan 45,4%.

Berdasarkan Tabel 17, dapat dilihat bahwa dari 82 sekolah inklusi yang menjadi sampel penelitian, terdapat 1 sekolah yang memiliki rekapitulasi total capaian sekolah inklusi dengan kriteria sangat baik, yaitu SMPN 1 Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. SMPN 1 Sidorejo memiliki hasil rekapitulasi total capaian yang lebih unggul daripada sekolah lain dengan skor 297 dengan persentase 81,37%. Hal tersebut dibuktikan dengan skor unggul yang diperoleh SMPN 1 Sidorejo dengan beberapa aspek berikut: skor 15 untuk identitas sekolah (78,95%) dengan kriteria baik, skor 64 untuk sarana dan prasarana sekolah (78%) dengan kriteria baik, skor 29 untuk data tenaga pendidik dan kependidikan (87,9%) dengan kriteria sangat baik, skor 22 untuk data kesiswaan

(81,5%) dengan kriteria sangat baik, skor 30 untuk implementasi pendidikan inklusif aspek kelembagaan (90,0%) dengan kriteria sangat baik, skor 6 untuk implementasi pendidikan inklusif aspek kurikulum (100%) dengan kriteria sangat baik, skor 27 untuk implementasi pendidikan inklusif aspek pembelajaran (81,8%) dengan kriteria sangat baik, skor 30 untuk implementasi pendidikan inklusif aspek penilaian dan kenaikan kelas (90,9) dengan kriteria sangat baik, skor 30 untuk implementasi pendidikan inklusif aspek kesiswaan (83,3%) dengan kriteria sangat baik, skor 19 untuk implementasi pendidikan inklusif aspek sumber daya manusia (79,2%) dengan kriteria baik, skor 8 untuk implementasi pendidikan inklusif aspek sarana dan prasarana (50%) dengan kriteria sedang, skor 11 untuk implementasi pendidikan inklusif aspek peran serta masyarakat (78,6) dengan kriteria baik, dan skor 6 untuk implementasi pendidikan inklusif aspek pembiayaan (66,7%) dengan kriteria baik.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia melalui 9 dimensi, yaitu dimensi kelembagaan, dimensi kurikulum, dimensi pembelajaran, dimensi penilaian, dimensi kesiswaan, dimensi SDM, dimensi sarana dan prasarana, dimensi peran serta masyarakat, dan dimensi pembiayaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah di 82 sekolah di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) aspek kelembagaan dengan rata-rata 62%; 2) aspek kurikulum dengan rata-rata 71,1%; 3) aspek pembelajaran dengan rata-rata 53,1%; 4) aspek penilaian dan kenaikan kelas dengan rata-rata 60,9%; 5) aspek kesiswaan dengan rata-rata 54,6%; 6) aspek sumber daya manusia dengan rata-rata 45,8%; 7) aspek sarana dan prasarana dengan rata-rata 22,1%; 8) aspek peran serta masyarakat dengan rata-rata 50,8%; 9) aspek pembiayaan dengan rata-rata 45,4%.

DAFTAR RUJUKAN

- Barnes, C. & Mercer, G. (2003). *Disability Cambridge, Uk* : Polity Press (Chapter 1-Disability and Choices of Model).
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*, Australia – Indonesia Partnership, MCPM AIBEP Jakarta, Edisi Revisi.
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement : A Sociological Approach*, New York : St Martin's Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkecenderungan dan/atau peserta Didik dengan Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa.

- Ro'fah., Andayani., & Muhrisun. (2010). *Membangun Kampus Inklusif, Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, Diterbitkan oleh Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Stainback, S., & Stainback, W. (1996). *Inclusion, A Guide for Educators*, Paul. H. Brokes Pubisihing, Co. Baltimore, London, Toronto, Sydney.
- Sunardi., Yusuf, M., Priono. (2010). *The Implementation of Inclusive Education in Indonesia*, Research Report International Collaborative Research Grant Funded by World Class University Project DIPA Sebelas Maret University.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yi, D., Gerken, K. C., Van, D. D. C., Fei, X. (2006). Parents' and Special Education Teachers' Perspectives of Implementing Individualized Instruction in P.R. China : An Empirical and Sociocultural Approach, *International Journal of Special Education*, 21(3).
- Yusuf, M., & Indianto, R. (2009). *Kajian Tentang Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Boyolali*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
- Yusuf, M. (2014), *Manajemen Sekolah Berbasis Pendidikan Inklusif*, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

